

Atribut Penentu Keberhasilan Program Kapal Bantuan dalam Peningkatkan Kesejahteraan Nelayan

Determinant Attribute Ship Assistance Program Successfulness on Fishermen Welfare Enhancement

Mira

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
miraclenia@yahoo.com, 081298678065.

Diterima 20 Oktober 2014, direvisi 20 November 2014, disetujui 10 Februari 2015.

Abstract

The purpose of this study is to analyze determinant attribute of the success of ship assistance program to enhance fishermen welfare. The study uses multidimensional scalling (MDS) for economic, social, and institutional dimension. The results of the analysis indicate that stress values for all dimensions is close to 0, it means that configuration measurement attribute for the sustainability of the program in one point is quite appropriate. In social dimension, the attributes that affect the sustainability of the assistance program are an increase community participation in program, increase cooperation in fishing effort, an increase in the number of villages that received the program, and strengthening the involvement of indigenous peoples in the program. In institutional dimension, priorities for improving the sustainability of the program are to strengthen the microfinance institutions, social institutions, and the strengthening of the fishermen group. In the economic dimension, the attributes that affect the sustainability of the program are alternative livelihoods, business profits of the fishery, the fisheries subsidies, availability of human resources (fishermen), and transfer of profits

Key Words: *Determinat Attributes; Ship Assistance Program Successfulness; Fishermen Welfare Enhancement*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis atribut penentu keberhasilan program kapal bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Metode analisis data yang digunakan adalah RAPFISH dengan menggunakan multidimensional *scalling* (MDS) pada dimensi sosial, kelembagaan, dan ekonomi. Hasil analisis MDS mengindikasikan nilai *stress* pada semua dimensi mendekati nol, yang artinya ketepatan pengukuran konfigurasi atribut keberhasilan program dalam suatu titik adalah cukup tepat. Pada dimensi kelembagaan, prioritas untuk meningkatkan keberhasilan program Kapal bantuan adalah penguatan pada atribut kelembagaan keuangan mikro, lembaga sosial, lembaga penyuluh, penguatan kelompok pengawas dan kelompok nelayan. Pada dimensi sosial titik berat implikasi kebijakan pada atribut peningkatan partisipasi masyarakat dalam program Kapal bantuan, peningkatan kerja sama dalam usaha perikanan tangkap, peningkatan jumlah desa yang memperoleh bantuan kapal, dan penguatan keterlibatan masyarakat adat dalam program Kapal bantuan. Pada dimensi ekonomi, atribut yang tersensitif yang mempengaruhi keberhasilan program Kapal bantuan adalah alternatif usaha selain usaha perikanan tangkap, keuntungan usaha dari perikanan tangkap, subsidi terhadap perikanan tangkap, tenaga kerja dalam hal ini nelayan atau ABK yang menjalankan kapal bantuan, ketersediaan SDM. Diharapkan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap memperhatikan budaya *one day fishing* pada masyarakat pesisir, kebiasaan masyarakat terhadap (alat tangkap dan ukuran kapal), *transfer knowledge*, dan faktor kualitatif lainnya, tidak hanya memperhatikan faktor kuantitatif seperti potensi perikanan pada setiap daerah, jumlah nelayan, jumlah produksi, jumlah kapal, jumlah KUB (Kelompok Usaha Bersama), dan keberadaan pelabuhan perikanan.

Kata Kunci: *Atribut; Diterminan; Kapal Bantuan; Keberhasilan Perikanan Tangkap*

A. Pendahuluan

Masyarakat pesisir identik dengan kemiskinan dan kekumuhan. Hal ini bisa dilihat dari kondisi rumah masyarakat pesisir yang masih banyak dalam bentuk semi permanen. Menurut

Hasil penelitian Panelkanas pada tahun 2012 menunjukkan 35 persen kondisi rumah nelayan dalam bentuk semi permanen. Bahkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2008 mengenai tingkat kemiskinan membe-

narkan fakta bahwa masyarakat pesisir identik dengan kemiskinan. Pada tahun 2008 ada 34,96 juta penduduk miskin, dimana 63,47 persen berada pada kawasan pesisir. Mengentaskan kemiskinan di masyarakat pesisir menjadi salah satu program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, oleh karena itu dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengoptimalkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) melalui Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) dan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). PUMP terbagi ke dalam dua sektor yaitu sektor perikanan tangkap, sektor garam, dan sektor perikanan budidaya, dan Program bantuan kapal 30 GT (Inka Mina).

Khusus program, bantuan kapal 30 GT diharapkan sebagai motor pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di masyarakat pesisir. Ada pun salah satu cara adalah peningkatan produksi, produktifitas, dan penyerapan tenaga kerja di masyarakat pesisir melalui program bantuan yang diberikan berupa kapal. Khususnya tujuan program ini adalah memperkuat Armada Perikanan Nasional dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, menjaga wilayah NKRI dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Banyak kapal program bantuan yang tidak beroperasi setelah serah terima dengan penerima bantuan. Misalnya dari KAPAL BANTUAN yang disalurkan pada tahun 2010, berdasarkan hasil monitoring per 3 November 2012, ada enam kapal yang disalurkan tidak dapat beroperasi, seperti di Kalimantan Selatan (Kota Baru), Papua Barat (Sorong dan Manokwari), Sumbar (Pesisir Selatan), Nusa Tenggara Timur (Ende), dan Maluku Tenggara. Banyak faktor yang menyebabkan banyaknya kapal yang tidak beroperasi (keberhasilan program bantuan Kapal), di antaranya adalah dimensi ekonomi (pengaturan kegiatan ekonomi untuk keberhasilan program Kapal bantuan), dimensi sosial (dukungan sistem sosial untuk keberhasilan program ini), dan dimensi kelembagaan (tingkat pengaturan yang dibutuhkan

dalam keberhasilan program bantuan kapal). Bagaimana indikator keberhasilan program bantuan kapal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan dimensi kelembagaan itulah tujuan dari penelitian ini?

C. Penggunaan Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan atribut pada metode RAPFISH (*Rapid Appraisal for Fisheries*). Metode ini dikembangkan dan pernah digunakan oleh Fauzy, A dan Suzy, A (2002) untuk menganalisis keberhasilan status keberlanjutan program perikanan di wilayah DKI Jakarta. Di luar negeri teknik ini pernah digunakan oleh Pitcher dan Power (2000), dan Pada tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan, metode ini pernah digunakan oleh Sidiq. M (2010) untuk menganalisis program keberhasilan perikanan tangkap dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Semarang. Kelebihan atribut pada RAPFISH menurut Nijkamp (1980), banyak informasi kuantitatif dari nilai proyeksi yang dihasilkan. Pauly (1998) menambahkan dengan menggunakan Rapfish maka peneliti dapat memilah dalam suatu program untuk menentukan mana yang akan menjadi fokus dalam program tersebut.

Kelemahan dari metode analisis Rapfish adalah adanya aspek ketidakpastian, karena kesalahan responden saat melakukan scoring (Hartono, et al, 2005). Kesalahan scoring tersebut terjadi karena minimnya informasi yang dimiliki oleh responden. Kelemahan dari metode Rapfish tidak serta merta membuat metode ini tidak bisa digunakan dalam menganalisis keberlanjutan perikanan pada suatu wilayah. Implementasi pada wilayah Indonesia yang memiliki karakteristik *tropical fisheries*, *multispecies*, *open access* dan negara berkembang, RAPFISH masih tetap aktual untuk dilakukan di Indonesia (Johar, 2012).

Dalam analisis ini aspek yang dilihat adalah dimensi sosial, ekonomi, dan dimensi kelembagaan (Sembiring, 2007). Dimensi sosial berkaitan dengan tingkat pendidikan formal

nelayan masyarakat, keterlibatan nyata dalam bidang perikanan, pemberdayaan masyarakat perikanan, peran masyarakat adat dalam kegiatan masyarakat, peran masyarakat dalam pengelolaan perikanan tangkap, akses masyarakat terhadap perikanan tangkap, frekuensi konflik perikanan tangkap, alokasi waktu untuk usaha perikanan tangkap, jumlah desa dengan penduduk bekerja di sektor perikanan tangkap, kerjasama dalam usaha di bidang perikanan tangkap, dan partisipasi keluarga dalam usaha perikanan tangkap. Dimensi sosial merupakan cerminan sistem sosial yang mendukung atau tidak dapat mendukung program Kapal bantuan dalam perikanan tangkap secara berkelanjutan.

Dimensi kelembagaan berkaitan dengan kerjasama pemerintah pusat dan daerah dalam bantuan kapal 30 GT, keberadaan perangkat hukum, keberadaan peraturan perundangan pelaksanaan program bantuan kapal 30 GT, mekanisme kerjasama lintas sektoral dalam program 30 GT, keberadaan lembaga pendukung kelompok nelayan, keberadaan lembaga keuangan mikro, keberadaan lembaga sosial, keberadaan lembaga penyuluhan perikanan, keberadaan kelompok pengawas, dan keberadaan kelompok nelayan. Dimensi kelembagaan menggambarkan tingkat pengaturan yang dibutuhkan dalam keberhasilan program bantuan kapal.

Menurut Budianto (2012), dimensi ekonomi memuat atribut ketersediaan pasar ikan, keragaman komoditas unggulan, pemilikan aset produksi perikanan tangkap oleh masyarakat, kontribusi sektor perikanan tangkap terhadap produk domestik bruto, kontribusi perikanan tangkap terhadap pendapatan asli daerah, perubahan nilai anggaran daerah selama lima tahun terakhir, harga komoditas perikanan tangkap, potensi pengembangan usaha agroindustri dari perikanan tangkap, potensi pengembangan usaha agroindustri dari perikanan tangkap, ketersediaan sumber daya manusia perikanan dalam hal ini nelayan, penyerapan tenaga kerja perikanan di perikanan tangkap, tingkat ketergantungan konsumen terhadap perikanan tangkap, kelayakan usaha perikanan tangkap, keuntungan dalam

usaha perikanan tangkap, besarnya subsidi untuk perikanan tangkap, transfer keuntungan, dan alternatif usaha di luar bidang perikanan tangkap. Dimensi ini merupakan sebuah gambaran tingkat pengaturan kegiatan ekonomi dalam keberhasilan program bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sapanli, 2009).

Guna mengoperasionalkan metode analisis Rapsfish digunakan multidimensional scalling (MDS). MDS merupakan sebuah teknik pembuatan grafik atau peta untuk menggambarkan posisi sebuah objek (Nurmalina, R). Langkah untuk metode analisis data ini, pertama adalah tahapan mendeterminasikan atribut keberhasilan program kapal bantuan yang terdiri dari dimensi ekologi, ekonomi, teknologi, sosial, dan kelembagaan. Kedua adalah tahapan evaluasi dimana setiap atribut dibuat dalam suatu *mapping* dalam setiap dimensinya. Tahapan ketiga adalah menganalisis setiap indikator keberhasilan program Kapal bantuan melalui nilai-nilai yang diperoleh dari analisis MDS. Pada analisis ini akan dilihat nilai stress dan nilai RSQ (*squared correlation*). Nilai stress yang mendekati nol adalah yang paling ideal. Sedangkan untuk nilai RSQ yang mendekati 1 adalah nilai yang paling ideal.

Lokasi kegiatan adalah wilayah yang menerima bantuan kapal program Inka Mina pada tahun 2010-2012, dimana lokasi penelitian diambil secara purposif sampling dan penelitian dilakukan 2012. Data dikumpulkan dalam bentuk data sekunder dan data primer. Adapun data sekunder diperoleh dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), KUB Pengelola, dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Sedangkan data primer berupa wawancara dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Dinas Kelautan dan Perikanan, KUB pengelola, anggota KUB penerima, dan Bapak Angkat KUB pengelola, dan penyuluh dan pendamping.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Kajian tentang Program Peningkatan Kesejahteraan Nelayan

Program peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan agenda penting di negara

berkembang, salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sundah *et al.* (2013) menyatakan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir penting, karena wilayah pesisir sangat rentan terhadap dampak pembangunan yang mengabaikan aspek lingkungan dan sosial. Hal tersebut menyebabkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir salah satunya nelayan adalah penting. Program Inka Mina merupakan sebuah program bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam bentuk bantuan kapal besar dan berteknologi tinggi (30 GT) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir (nelayan).

Salah satu faktor pendorong pentingnya program peningkatan kesejahteraan nelayan adalah pada satu sisi terjadi penurunan hasil tangkapan, pada sisi lain terjadi peningkatan biaya karena kenaikan harga BBM. Hal yang sama juga terjadi di Eropa, menurut Johnsen dan Vik (2013), selama 3 dekade, usaha penangkapan ikan mengalami penurunan. Guna membantu nelayan yang kesulitan tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat Program bantuan Kapal Inka Mina. Faktor pendorong lainnya pentingnya program peningkatan kesejahteraan nelayan, menurut Bakar *et al.* (2012), adalah karena masyarakat pesisir (nelayan) karena masih dibawah garis kemiskinan dan sulit terhadap akses modal.

Kemiskinan pada masyarakat nelayan disebabkan oleh beberapa faktor seperti pertumbuhan penduduk yang tinggi, kualitas sumberdaya manusia, dan rendahnya produktifitas. Wijayanti dan Ihsanudin (2013), mengungkapkan rendahnya produktifitas disebabkan oleh rendahnya aktivitas ekonomi yang dilakukan karena keterbatasan modal. Rendahnya produktifitas tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik minimum yang menyebabkan terjadinya proses kemiskinan. Nelayan tidak memiliki aset produksi karena miskin, dampak lanjutannya adalah mereka terjatuh dalam lingkaran kemiskinan yang memaksa mereka hanya menjadi buruh atau anak buah kapal (ABK).

Menurut Trisbiantoro *et al.* (2013), program peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dilakukan melalui strategi pemberdayaan total (*total empowerment*) yang didalamnya mencakup adanya program perlindungan sosial, perbaikan lingkungan, pemberdayaan sumberdaya manusia, dan pemberdayaan ekonomi produktif. Program tersebut harus benar-benar difokuskan untuk mendukung program pemberdayaan usaha ekonomi produktif masyarakat miskin, dimana usaha ekonomi tersebut harus layak secara ekonomis, prospektif, dan secara teknis mudah diterapkan. Trisbiantoro *et al.* (2013), menambahkan bahwa usaha Untuk itu upaya pemberdayaan dapat dilakukan dengan tiga langkah: Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang; Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*); Ketiga, melindungi (*protecting*), sehingga proses pemberdayaan harus mencegah yang lemah menjadi semakin lemah akibat kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat.

Program untuk pengentasan kemiskinan nelayan sudah banyak dibuat oleh pemerintah, seperti yang disusun Ticoalu *et al.*, 2013, antara lain program motorisasi armada nelayan skala kecil (Keppres No.39 tahun 1980), program sistem rantai dingin untuk petambak dan nelayan pada tahun 1980-an, program pembangunan sarana perikanan, Protekan pada tahun 2003 untuk peningkatan ekspor perikanan, program koperasi perikanan KUD Mina, program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir pada tahun 2008, bantuan langsung masyarakat kelautan dan perikanan pada tahun 2008, program pengembangan usaha mina pada tahun 2011, program pengembangan usaha mina pedesaan-mandiri pada tahun 2012. Program-program tersebut dirancang untuk meningkatkan masyarakat kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan dan kemandirian masyarakat.

Program yang dirancang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ditujukan untuk rumah tangga nelayan. Menurut Wasak (2012), rumah

tangga nelayan memiliki karakteristik sendiri seperti penggunaan wilayah pesisir dan laut sebagai faktor produksi, jam kerja harus mengikuti kondisi oseanografis dimana waktu melaut hanya rata-rata sekitar 20 hari dalam satu bulan, sisanya nelayan tidak bekerja, dan pekerjaan menangkap ikan merupakan pekerjaan yang penuh risiko. Usaha perikanan masih bersifat tradisional yang dikelola dengan skala ekonomi rendah dan manajemen yang bersifat keluarga.

2. Permasalahan Program Bantuan Kapal dalam Peningkatan Kesejahteraan Nelayan

Tahun 2010, pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan membuat program bantuan kapal 30 GT yang disebut kapal Inka Mina. Banyaknya kapal bantuan baik yang diserahkan pada tahun 2010 maupun tahun 2011 yang tidak beroperasi pada tahun 2012. Banyak program kapal ini tidak bisa digunakan, karena ada faktor lainnya yang belum dipertimbangkan (faktor kualitatif) oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, seperti budaya *one day fishing* pada masyarakat pesisir, kebiasaan masyarakat (alat tangkap dan ukuran kapal), *transfer knowledge*, dan faktor lainnya.

Tidak dimasukkannya faktor kualitatif tersebut menyebabkan banyak kapal bantuan yang sudah diserahterimakan dijalankan oleh nelayan dari wilayah lain karena budaya melaut penerima bantuan tidak terbiasa dengan trip lama (6 bulan). Budaya melaut penerima bantuan terbiasa dengan sistem *one day fishing*. Sedangkan kapal bantuan yang diserahkan adalah kapal yang memakan waktu cukup lama dalam satu kali trip. Bahkan banyak kapal bantuan yang sudah diserahterimakan dijalankan oleh nelayan dari wilayah lain karena budaya melaut penerima bantuan tidak terbiasa dengan trip lama.

Permasalahan lainnya adalah banyak kapal dan alat tangkap yang diserahkan tidak sesuai dengan kebiasaan penangkapan masyarakat (misalnya di Pelabuhan Ratu bantuan alat tangkap *long line*, sedangkan keahlian utama nelayan adalah payang, *gill net*, dan bagan). Selain itu

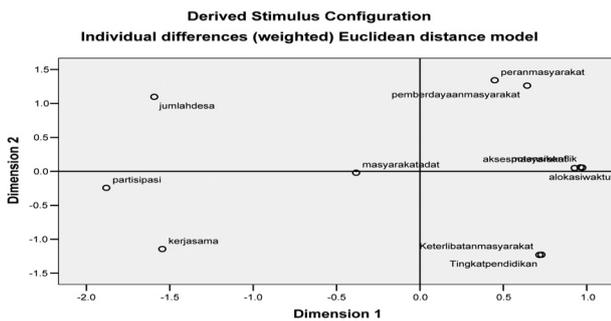
adalah ketidaksesuaian kelompok penerima bantuan, dimana tidak adanya keinginan kuat dari mereka untuk mengoperasikan kapal. Di Pelabuhan Ratu semua ABK-nya (anak buah kapal) adalah dari luar wilayah (Jawa Tengah). Hal ini disebabkan karena kelompok penerima bantuan tidak terbiasa dengan trip lama (6 bulan).

Di Papua, kelompok penerima bantuan dari papua diganti ke yang anggotanya merupakan campuran dari orang bugis, makasar, jawa, dan orang papua sendiri. Pergantian ini atas alasan, jika kelompok penerima bantuan bukan asimilasi, terutama nelayan dari orang papua sendiri, dikhawatirkan mereka tidak mampu mengelolanya. Hal ini disebabkan sebelumnya kapal bantuan dikelola oleh kelompok penerima bantuan yang anggotanya semuanya orang papua. Orang papua tidak terbiasa dengan budaya melaut satu kali trip yang membutuhkan waktu 6 bulan, biasanya mereka hanya melaut dengan sistem *one day fishing* (ODF). Apalagi budaya orang papua yang belum terbiasa melaut lama dikhawatirkan menghambat pelaksanaan program ini. Guna mengatasi masalah ini maka kelompok penerima bantuan dipindahkan dari sebelumnya yang anggotanya semua Papua ke kelompok yang anggotanya merupakan asimilasi dari berbagai suku (Bugis, Makasar, dan Jawa). Asimiliasi ini diharapkan mampu menularkan etos kerja dan budaya melaut yang jauh (6 bulan satu kali trip) dari orang bugis ke orang papua.

3. Dimensi Sosial Keberhasilan Program Kapal Bantuan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Nelayan

Pada dimensi sosial dari analisis leverage, dari 11 atribut yang dimasukkan dalam model, atribut yang tersensitif yang mempengaruhi keberhasilan program bantuan adalah partisipasi masyarakat, kerja sama masyarakat dalam usaha perikanan tangkap, jumlah desa yang memperoleh bantuan, dan adanya keterlibatan masyarakat adat dalam program Kapal bantuan. Hal ini disebabkan keempat atribut tersebut terindikasi di lapangan sebagai atribut yang

kondisinya sangat jelek. Adapun intepetasi terhadap hasil analisis terhadap kondisi lapang adalah jika terjadi peningkatan atau penurunan terhadap atribut partisipasi masyarakat dalam program Kapal bantuan, kerja sama dalam usaha perikanan tangkap, jumlah desa yang memperoleh bantuan, dan adanya keterlibatan masyarakat adat dalam program Kapal bantuan akan membawa akibat yang sangat signifikan terhadap keberhasilan program Kapal bantuan. Hal ini membawa implikasi bahwa prioritas untuk meningkatkan keberhasilan program Kapal bantuan adalah peningkatan partisipasi dan kerja sama masyarakat dalam program Kapal bantuan dengan menambah jumlah desa yang menerima bantuan. Hal yang tidak kalah penting lainnya peningkatan keterlibatan masyarakat adat dalam program bantuan Kapal bantuan.



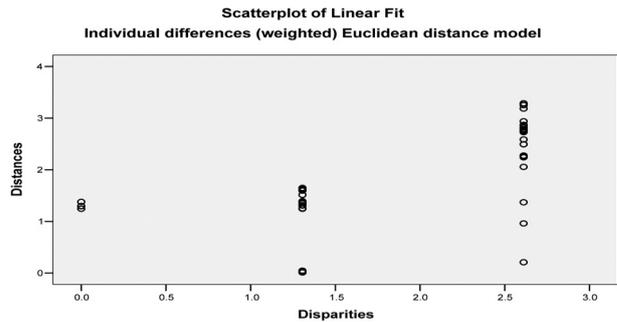
Sumber: Data diolah, 2012

Gambar 1

Ordinasi Dimensi Sosial Keberhasilan Program Kapal bantuan dari MDS Model

Partisipasi masyarakat yang rendah, kurangnya kerja sama dalam usaha perikanan, dan kurangnya keterlibatan masyarakat adat dalam usaha perikanan terutama di Pelabuhan Ratu karena kehidupan masyarakat di wilayah semakin individualis. Selain itu, partisipasi masyarakat rendah dalam program Kapal bantuan karena penunjukan kelompok penerima bantuan ditentukan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan secara *top down*, dimana sebelumnya kelompok penerima bantuan (KUB) yang sudah memenuhi Petunjuk Teknis diajukan oleh dinas kelautan dan perikanan kabupaten, tanpa melibatkan tokoh masyarakat. Meski pun keterlibatan adat

dalam pembangunan di Manokwari dan Padang Pariaman Tinggi, tapi dalam program Kapal bantuan keterlibatan mereka sangat rendah. Jumlah desa yang menerima bantuan Kapal bantuan di Pelabuhan Ratu adalah satu desa dengan dua KUB penerima bantuan, di Manokwari satu desa dan di Padang Pariaman satu desa.



Sumber: Data diolah, 2012

Gambar 2.

Posisi Keberhasilan Program Inka Mina pada Dimensi Sosial

Atribut dimensi sosial yang tidak sensitif terhadap keberhasilan program Kapal bantuan adalah akses masyarakat terhadap program bantuan, alokasi waktu untuk usaha perikanan tangkap, tingkat pendidikan, potensi konflik, dan pemberdayaan masyarakat. Artinya, untuk meningkatkan keberhasilan program kapal bantuan maka atribut-atribut ini bukan aspek utama dalam implikasi kebijakan, karena pengaruhnya sangat kecil terhadap keberhasilan program. Program Pemberdayaan masyarakat cukup banyak di lokasi penelitian terutama di bidang perikanan seperti PUMP Tangkap, PUMP Budi daya, PUMP pengolahan, Pugar, PDPT, dan Inka Mina. Tingkat pendidikan masyarakat cukup tinggi di Pelabuhan Ratu, dan termasuk cukup rendah di Padang Pariaman dan Wonokwari. Potensi konflik di Pelabuhan Ratu dan Padang Pariaman cukup rendah, namun cukup tinggi di Wonokwari karena adanya kecemburuan antar suku. Alokasi waktu untuk usaha perikanan tangkap di tiga lokasi penelitian adalah bukan paruh waktu, karena menangkap ikan adalah mata pencarian utama.

Pada dimensi sosial hasil analisis MDS menghasilkan 4 kali iterasi dengan nilai stress sebesar 0,33 yang artinya ketepatan pengukuran konfigurasi atribut keberhasilan program dari dimensi ekonomi dalam suatu titik adalah sangat tepat. Hasil analisis nilai stress mendekati nol artinya output yang dihasilkan semakin mirip dengan keadaan sebenarnya. Sedangkan nilai RSQ (squared correlation) diperoleh diperoleh sebesar 0,45.

Di Pelabuhan Ratu masyarakat pada umumnya masih menggunakan kapal yang ukuran rata-ratanya adalah 7 GT, sedangkan di Padang Pariaman dan Monokwari ukuran kapal masyarakat adalah di bawah 7 GT. Kebiasaan masyarakat menggunakan teknologi perikanan tangkap yang sederhana menjadi sebuah permasalahan ketika ada bantuan kapal yang berukuran di atas 30 GT (berteknologi tinggi). Permasalahan tersebut adalah sulitnya membiasakan masyarakat untuk melaut lebih lama (selama 6 bulan) dari budaya *one day fishing* (selama satu hari). Hal ini dibuktikan di Pelabuhan Ratu, tidak ada keinginan kuat dari anggota KUB untuk mengoperasikan kapal.

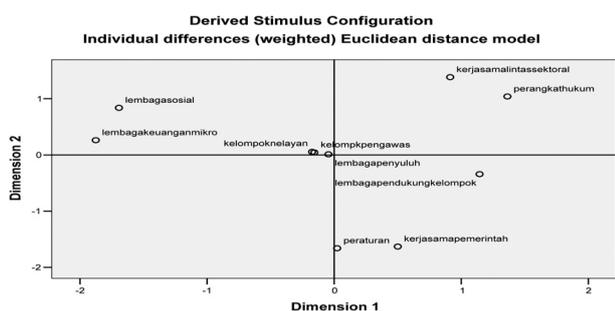
Salah satu kapal bantuan INKA MINA yang memiliki 12 ABK, saat ini 12 ABK itu berasal dari Jawa Tengah, bukan asli nelayan dari Pelabuhan Ratu. Awalnya, ada lima ABK yang berasal dari Pelabuhan Ratu dan merupakan anggota dari KUB yang menerima Inka Mina, tapi kemudian mereka mengundurkan diri menjadi ABK karena alasan tidak kuat melaut dalam waktu lama (enam bulan dalam satu kali trip). Sebelumnya ke-5 ABK tersebut merupakan nelayan yang memiliki kapal ukuran di bawah lima GT, dimana biasanya melaut dengan sistem *one day fishing*. Padahal dengan adanya lima anggota KUB yang menjadi ABK merupakan salah satu cara untuk *transfer knowledge* mengenai operasional kapal besar dan alat tangkap *long line*. Sebelumnya dominan nelayan di Pelabuhan Ratu hanya memiliki perahu kecil (kurang dari tujuh GT) dengan alat tangkap payang, *gill net*, dan *head line*.

Untuk program kapal bantuan pada tahun berikutnya supaya atribut peran dan partisipasi nelayan dioptimalkan dengan memperhatikan anggota penerima bantuan kapal (KUB) harus terbiasa dan mau untuk melaut dalam jangka waktu lama. Anggota KUB yang menjadi ABK tersebut bisa dilakukan bergantian. Misalnya KUB penerima bantuan memiliki 12 anggota, 10 dari anggota KUB harus bersedia menjadi ABK dengan sistem bergantian (lima anggota melaut di trip pertama, sedangkan lima anggota lainnya di trip kedua). Anggota KUB yang bergantian trip ini dimaksudkan untuk mengurangi kejenuhan bekerja, tidak mungkin memaksa seluruh anggota KUB melaut selama setahun penuh. Selain itu, pergantian itu dimaksudkan juga untuk *transfer knowledge* dari ABK yang disewa dari wilayah lain ke anggota KUB. Hal ini disebabkan karena anggota KUB belum terbiasa menggunakan kapal yang berukuran lebih besar (30 GT) dengan alat tangkap yang lebih modern. Jadi tidak ada alasan dari anggota KUB mengundurkan diri dari ABK karena alasan tidak terbiasa dengan sistem melaut yang membutuhkan waktu lama.

Rendahnya atribut peran dan partisipasi masyarakat (nelayan) selain disebabkan oleh budaya melaut juga ada masalah etos kerja, dimana nelayan yang menerima bantuan tidak ada keinginan untuk bekerja keras menyerap ilmu mengenai teknologi penangkapan yang modern. Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat, di Pelabuhan Ratu ada kecenderungan peningkatan bantuan ke nelayan menyebabkan nelayan menjadi malas untuk mencari nafkah. Bahkan tokoh masyarakat mengisyaratkan masyarakat inginnya bantuan tersebut berupa uang, bukan kapal. Jadi pemilihan KUB dan lokasi penerima bantuan harus diseleksi secara ketat lagi terutama masalah budaya melaut "*one day fishing*" dan etos kerja dari nelayan yang menerima bantuan. Nelayan yang menerima bantuan harus terbiasa dan mau dengan budaya melaut dalam jangka waktu lama (minimal 6 bulan dalam satu kali trip) dan memiliki etos kerja yang tinggi, bukan pemalas.

4. Dimensi Kelembagaan (Institusi) Keberhasilan Program Bantuan Kapal

Pada dimensi kelembagaan dari analisis *leverage*, dari 10 atribut yang dimasukkan dalam model, atribut yang tersensitif yang mempengaruhi keberhasilan program Kapal bantuan adalah keberadaan lembaga keuangan mikro, keberadaan lembaga sosial, institusi penyuluh, keberadaan kelompok pengawas dan keberadaan kelompok nelayan. Adapun intrepetasi terhadap hasil analisis terhadap kondisi lapang adalah jika terjadi peningkatan atau penurunan terhadap atribut yang sensitif ini akan membawa akibat yang sangat signifikan terhadap keberhasilan program bantuan. Hal ini membawa implikasi bahwa prioritas untuk meningkatkan keberhasilan program Kapal bantuan adalah penguatan kelembagaan keuangan mikro, lembaga sosial, lembaga penyuluh, penguatan kelompok pengawas dan kelompok nelayan.



Sumber: Data diolah, 2012

Gambar 3
Ordinasi Dimensi Kelembagaan
Untuk Keberhasilan Program Kapal Bantuan
dari MDS

Penguatan kelembagaan keuangan mikro dibutuhkan untuk mendukung program Kapal bantuan dalam hal bantuan operasional kapal. Penyebab indek hari operasi kapal masih rendah adalah besarnya biaya operasional yang dibutuhkan satu kali trip (enam bulan) dimana minimal Rp 500 juta. Padahal di sisi lain KUB penerima bantuan memiliki modal terbatas. Permasalahan ini bisa di-*asement* dengan penguatan kelembagaan keuangan mikro seperti koperasi atau bapak angkat untuk bekerja sama dengan KUB

penerima bantuan. DJPT juga sudah berhak mengubah KUB penerima bantuan jika KUB tersebut tidak bisa membuat kerjasama dengan lembaga keuangan mikro (koperasi atau bapak angkat), seperti yang terjadi di Sumatera Barat dan Papua. Di Sumatera Barat, KUB sebelumnya tidak mampu mengoperasikan kapal bantuan karena permasalahan biaya dan KUB ini juga tidak mampu mencari bapak angkat. Pada tahun 2012, DJPT menyerahkan ke KUB yang memiliki modal besar dan mampu mencari bapak angkat.

Dalam Juknis, ada tiga model pengelolaan kapal bantuan, pertama model pengelolaan taxi mina bahari, yaitu model pengelolaan kapal yang dilaksanakan oleh KUB (Kelompok Usaha Bersama) dengan menyiapkan dana untuk biaya operasional kapal seperti biaya untuk kebutuhan BBM, lauk pauk, umpan dan biaya lainnya, dimana nelayan tinggal mengoperasikan kapal yang nantinya hasilnya disetorkan ke KUB. Dalam model pengelolaan KUB penerima kapal bantuan Inka Mina berarti memiliki cukup banyak modal untuk membiayai operasional kapal, dimana satu kali trip minimal membutuhkan biaya sebesar Rp 500 juta. Namun, bila KUB tidak memiliki cukup banyak modal, yang minimal modalnya adalah Rp 500 juta, maka model pengelolaan yang digunakan adalah model pengelolaan kedua, yaitu model kerjasama operasi (KSO), dimana model pengelolaan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dimana mereka sepakat untuk mengelola kapal secara bersama dalam hal ini pengelolaan aset, hak usaha, dan risiko.

Model pengelolaan inilah yang digunakan oleh KUB penerima bantuan di Sumatera Barat, Pelabuhan Ratu, dan Papua. Model pengelolaan ini digunakan bila KUB memiliki modal yang terbatas sehingga membutuhkan pihak lain untuk membiayai operasional kapal. Pihak lain yang membiayai operasional kapal ini dinamakan "Bapak Angkat". Satu hal yang tidak kalah penting adalah bapak angkat diharapkan tidak hanya menjamin biaya operasional tapi juga penjualan. Pembagian hasil antara KUB dengan

bapak angkat ini adalah 40:60, artinya 60 persen untuk Bapak angkat dan 40 persen untuk KUB. Dimana bagi hasil merupakan keuntungan bersih (penerimaan setelah dikurangi biaya operasional, dan gaji ABK (anak buah kapal). Belajar dari pengalaman sistem pengelolaan Inka Mina di Pelabuhan Ratu, dimana “bapak angkat” tidak hanya menjamin biaya operasional juga penjualan hasil tangkapan, sehingga harga hasil tangkapan yang diterima adalah harga ekspor.

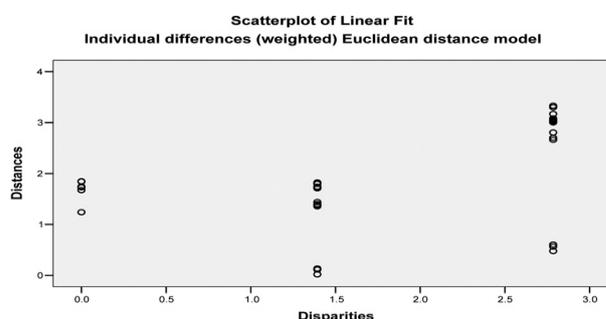
Misalnya Bapak angkat dari KUB DAFA di Pelabuhan Ratu adalah seorang eksportir, sehingga harga yang diperoleh oleh KUB adalah harga ekspor. Dalam penentuan harga, tidak hanya ditentukan oleh bapak angkat, pihak KUB juga memiliki “power”, dimana pihak KUB mengecek harga melalui harga ekspor dari pedagang lainnya. Dalam proses ini, nahkoda kapal memiliki catatan mengenai berapa hasil tangkapan dan harga dan dilaporkan ke Ketua KUB saat terjadi transaksi pembelian. Selama beroperasi (2,5) bulan, salah satu Inka Mina menyisihkan 70 persen pendapatan untuk cicilan utang ke Bapak Angkat, dan menyisihkan 30 persen dari pendapatan untuk *saving* yang nantinya ditujukan suatu investasi untuk kapal lainya bila umur teknis kapal bantuan sudah habis.

KUB memiliki utang ke Bapak Angkat berupa utang perbaikan kapal setelah kapal bantuan diserahterimakan. Hal ini disebabkan kapal bantuan tidak bisa langsung dioperasikan untuk melaut, harus dilakukan perbaikan. Misalnya di Pelabuhan Ratu, setelah kapal diserahterimakan, Bapak Angkat melakukan perbaikan (menambahkan lapisan *fiber*). Pendapatan yang dialokasikan untuk *saving* (30 persen) yang nantinya digunakan untuk suatu investasi untuk kapal lainya bila umur teknis kapal bantuan sudah habis. Dengan dana ini diharapkan KUB penerima bantuan diharapkan nantinya mampu membeli kapal yang ukurannya lebih dari 30 GT sehingga terjadi transfer teknologi dan peningkatan kesejahteraan nelayan.

Model pengelolaan yang ketiga adalah model pengelolaan yang dilakukan koperasi nelayan, dimana pengelolaan yang melibatkan suatu ke-

lompok usaha yang melakukan kegiatan ekonomi dibidang perikanan, dalam hal ini adalah koperasi nelayan. Model pengelolaan yang dilakukan oleh koperasi nelayan tidak banyak dilakukan, karena terbatasnya modal yang dimiliki oleh koperasi. Minimal modal yang dibutuhkan untuk membiayai operasional kapal selama satu kali trip (6) bulan adalah Rp 500 juta.

Penguatan kelembagaan penyuluh juga dibutuhkan untuk mendampingi KUB penerima bantuan dalam mengelola manajemen usaha dalam skala besar. Selama ini nelayan di tiga lokasi penelitian terbiasa mengelola usaha keluarga, tapi dengan adanya program bantuan maka usaha yang dikelola bertambah besar, karena itu dibutuhkan *transfer knowledge* mengenai pembukuan keuangan dan pengelolaan usaha. Penguatan kelompok nelayan dibutuhkan supaya pembentukan kelompok nelayan bukan hanya karena kebutuhan program Kapal bantuan, tapi benar-benar untuk mencapai tujuan kelompok yaitu peningkatan kesejahteraan anggota.



Sumber: Data diolah, 2012

Gambar 4.

Posisi Keberhasilan Program Kapal Bantuan pada Dimensi Kelembagaan

Atribut dimensi kelembagaan yang tidak sensitif terhadap keberhasilan program Kapal bantuan adalah kerja sama lintas sektoral, kerja sama antar pemerintah, perangkat hukum, pedoman teknis mengenai program Kapal bantuan atau peraturan lainnya, dan lembaga pendukung. Artinya, untuk meningkatkan keberhasilan program bantuan maka atribut-atribut ini bukan aspek utama dalam implikasi kebijakan, karena

pengaruhnya sangat kecil terhadap keberhasilan program. Keberadaan atribut ini cukup bagus di lapangan. Misalnya kerja sama antara pemerintah propinsi dan kabupaten dalam menentukan jumlah kapal bantuan pada setiap wilayah adalah cukup bagus. KUB penerima bantuan dapat memahami pedoman teknik atau peraturan terkait bantuan Kapal karena sosialisasi sudah dilakukan sebelumnya sebanyak 3 kali sebelum kapal diserahkan.

Pada dimensi kelembagaan tepatnya pada atribut kerjasama lintas sektoral adalah kerjasama antara Pemda yang diwakili oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diwakili oleh DJPT (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap). Pada tahun 2010, menurut DJPT, Pemda yang sangat kurang kerja samanya adalah Pemda Trenggalek, Tuban, Pacitan, Berau, Pamekasan, Rokan Hilir, DKI Jakarta, Subang, Sumut, dan DIY. Kurangnya kerja sama itu terlihat dari tidak ada balasan email atau sms ketika DJPT meminta hasil evaluasi terhadap program ini. Adapun assesment terhadap Pemda yang mangkir dari tanggung jawabnya adalah pihak DJPT akan mengurangi alokasi kapal kepada daerah tersebut. Pada tahun 2011, berdasarkan data dari pihak DJPT, Pemda yang tidak jadi dialokasikan untuk program kapal bantuan 30 GT ini adalah Asahan dan Bali. Tapi ada juga Pemda yang menyatakan ketidakmampuannya dalam mengelola program ini. Adapun kabupaten tersebut adalah Kab. Batubara, Tulung Agung, Kota Makasar, Tuban, Pacitan, Blitar, Lombok Utara, dan kota Bima.

Diharapkan program INKA MINA dari DJPT KKP juga mengutamakan wilayah perbatasan. Dari data yang ada, contohnya untuk lokasi Kabupaten Natuna tidak ada bantuan terkait program tersebut sejak tahun 2010 hingga 2012. Pengutamaan wilayah perbatasan juga selaras dengan tujuan program INKA MINA yaitu mengoptimalkan penangkapan di wilayah ZEEI dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Saat ini dengan perahu nelayan di wilayah perbatasan yang ukuran hanya 5 GT maka wilayah penangkapan hanya sejauh

3 mil, dengan bantuan program Inka Mina maka nelayan bisa menangkap pada wilayah ZEE, yang pada akhirnya nelayan perbatasan bisa mendapatkan akses kapal yang lebih besar dan mesin yang berteknologi tinggi.

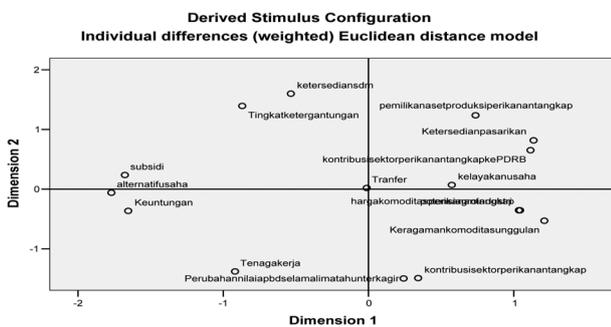
Keberadaan kelembagaan usaha di Pelabuhan Ratu, baik itu industri kecil sampai dengan industri yang berorientasi ekspor, cukup membantu nelayan dalam meningkatkan nilai tambah produk, mutu, dan standarisasi produk perikanan tangkap. Produk perikanan tangkap diolah menjadi bakso, ikan asin, pindang, kerupuk, dan nuget, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang tadinya hanya bertumpu pada perikanan tangkap, sekarang istri nelayan diperdayakan membuat olahan hasil dari melaut suami mereka. Masyarakat Manokwari belum optimal mengolah hasil perikanan tangkap untuk meningkatkan nilai tambah dan sebagai mata pencarian alternatif. Sedangkan di Pelabuhan Ratu dan Padang Pariaman atribut yang mendukung keberhasilan program Kapal bantuan adalah penggunaan hasil samping perikanan tangkap untuk menjadi produk yang bernilai tambah tinggi sebagai mata pencarian alternatif bagi istri nelayan.

Pada dimensi kelembagaan hasil analisis MDS menghasilkan 6 kali iterasi dengan nilai stress sebesar 0,47 yang artinya ketepatan pengukuran konfigurasi atribut keberhasilan program dari dimensi intitusi dalam suatu titik adalah cukup tepat. Hasil analisis nilai *stress* mendekati nol artinya output yang dihasilkan semakin mirip dengan keadaan sebenarnya. Sedangkan nilai RSQ (*squared correlation*) diperoleh diperoleh sebesar 0,22.

5. Dimensi Ekonomi Keberhasilan Program Kapal bantuan

Pada dimensi ekonomi dari analisis leverage, dari 16 atribut yang dimasukkan dalam model, atribut yang tersensitif yang mempengaruhi keberhasilan program Kapal bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah alternatif usaha selain usaha perikanan tangkap, keuntungan usaha dari perikanan tangkap,

subsidi terhadap perikanan tangkap, tenaga kerja dalam hal ini nelayan atau ABK yang menjalankan kapal bantuan, ketersediaan SDM, transfer keuntungan dan tingkat ketergantungan perekonomian terhadap usaha perikanan tangkap. Hal ini disebabkan karena ketujuh atribut tersebut terindikasi di lapangan sebagai atribut yang kondisinya sangat jelek. Adapun intepetasi terhadap hasil analisis terhadap kondisi lapang adalah jika terjadi peningkatan atau penurunan terhadap ketujuh atribut tersebut akan membawa akibat yang sangat signifikan terhadap keberhasilan program bantuan Inka Mina.



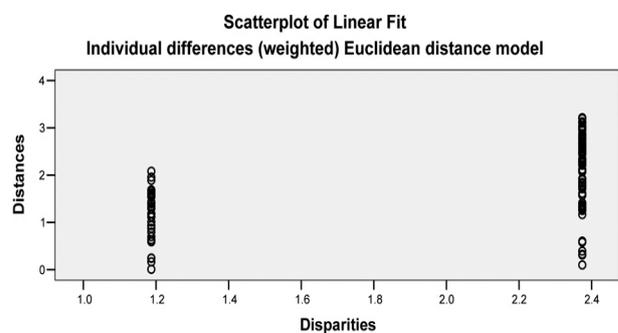
Sumber: Data diolah, 2012

Gambar 5
Ordinasi Dimensi Ekonomi
Untuk Keberhasilan Program Kapal Bantuan
dari MDS Model

Hal ini membawa implikasi bahwa prioritas untuk meningkatkan keberhasilan program Kapal bantuan pada dimensi ekonomi adalah pada atribut mencari mata pencarian alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat selain usaha perikanan tangkap karena dari tahun ke tahun usaha perikanan tangkap memberikan tingkat keuntungan yang semakin menurun. Penurunan tingkat keuntungan tersebut adalah pada satu sisi karena kenaikan harga bahan bakar minyak. Kontribusi bahan bakar minyak terhadap struktur biaya operasional penangkapan ikan mencapai 40 persen. Jika terjadi kenaikan BBM tentu saja sangat mengurangi keuntungan yang diterima nelayan, karena proporsinya terhadap biaya variabel sangat besar. Di Indonesia selama kurun waktu 2000-2005 sudah terjadi tu-

juh kali kenaikan (UPMS 1, Pertamina Medan), Kenaikan yang cukup tajam terjadi pada Oktober tahun yang sama, dimana naik dari 100 persen persen lebih (menjadi Rp 4.300). Di sisi lain, sumberdaya perikanan semakin menurun akibat *over fishing* sehingga nelayan harus mencari *fish-ing ground* yang lebih jauh. Kedua permasalahan menyebabkan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan karena penurunan rasio R/C (*revenue/cost*)

Rasio R/C rata-rata kapal Kapal bantuan kurang dari 2 (DJPT, 2012), artinya tingkat keuntungan yang diterima nelayan cukup rendah, hal ini disebabkan oleh hasil tangkapan yang kurang karena keterbatasan wilayah penangkapan. Wilayah penangkapan terbatas karena biaya operasional yang dibutuhkan untuk mencapai wilayah ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) dengan 6 bulan/trip adalah minimal Rp 500 juta. Besarnya biaya operasional kapal tentu membatasi wilayah penangkapan (kurang dari 12 mil), padahal sasaran dari program ini mengoptimalkan potensi di ZEEI (200 mil).



Sumber: Data diolah, 2012

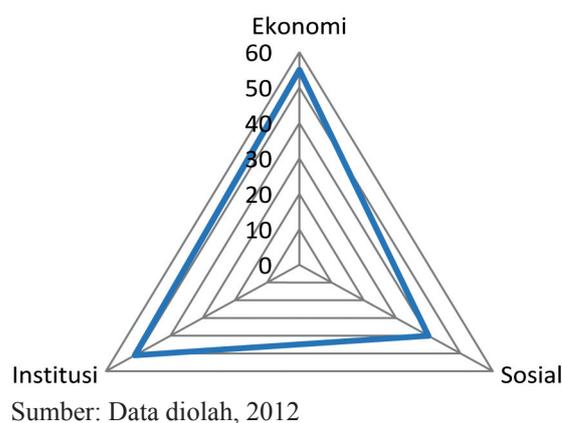
Gambar 6.
Posisi Keberhasilan Program Kapal Bantuan
pada Dimensi Ekonomi

Atribut mencari usaha alternatif selain perikanan tangkap sudah banyak terlihat di Pelabuhan Ratu, namun sedikit terlihat di Padang Pariaman apalagi di Manokwari. Alternatif usaha selain perikanan tangkap yang berkembang di Pelabuhan Ratu adalah pengolahan ikan. Pengolahan ikan di Pelabuhan Ratu sudah mengambil bahan baku dari luar wilayah pelabuhan akibat berkem-

bangnya usaha pengolahan dan penurunan hasil tangkapan nelayan setempat. Usaha pengolahan ikan merupakan mata pencarian alternatif karena akan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap usaha perikanan tangkap.

Implikasi lainnya adalah peningkatan keuntungan usaha dengan memberikan subsidi BBM ke nelayan, tapi pemberian subsidi BBM bukan pilihan yang bijak, karena ini membuat usaha perikanan tangkap tidak memiliki keunggulan kompetitif. Implikasi yang penting lainnya adalah atribut peningkatan mutu SDM atau tenaga kerja untuk mengoperasikan kapal Kapal bantuan yang berteknologi tinggi (30 GT). Guna adanya *transfer knowledge*, KUB (kelompok usaha bersama) baik yang ada di Pelabuhan Ratu atau di Manokwari, sebagian dari ABK-nya direkrut dari wilayah lainnya misalnya Jawa Tengah untuk kapal Kapal bantuan di wilayah Pelabuhan Ratu, dan ABK dari suku bugis atau makasar untuk kapal Kapal bantuan di Manokwari. Pergantian itu dimaksudkan juga untuk *transfer knowledge* dari ABK yang disewa dari wilayah lain ke anggota KUB. Hal ini disebabkan karena anggota KUB belum terbiasa menggunakan kapal yang berukuran lebih besar (30 GT) dengan alat tangkap yang lebih modern, sedangkan untuk atribut yang tidak sensitif terhadap keberhasilan program Kapal bantuan adalah atribut keragaman komoditas unggulan, ketersediaan pasar ikan, potensi agroindustri, dan kontribusi sektor perikanan tangkap terhadap PDRB atau pendapatan daerah. Pada lokasi penelitian komoditas yang menjadi unggulan pada perikanan tangkap adalah produk TTC (Tuna dan Cakalang).

Pada dimensi ekonomi hasil analisis MDS menghasilkan lima kali iterasi dengan nilai stress sebesar 0,33 yang artinya ketepatan pengukuran konfigurasi atribut keberhasilan program bantuan kapal dari dimensi ekonomi dalam suatu titik adalah sangat tepat. Hasil analisis nilai stress mendekati nol artinya output yang dihasilkan semakin mirip dengan keadaan sebenarnya, sedangkan nilai RSQ (squared correlation) diperoleh sebesar 0,34.



Gambar 7.
Diagram Layang Keberhasilan
Program Kapal Bantuan

E. Penutup

Permasalahan dari program bantuan kapal bantuan adalah banyak kapal bantuan yang sudah diserahterimakan dijalankan oleh nelayan dari wilayah lain karena nelayan penerima bantuan tidak terbiasa dengan trip lama (6 bulan). Hal ini disebabkan ada faktor lainnya yang belum dipertimbangkan oleh DJPT dalam penyaluran bantuan, seperti budaya *one day fishing* pada masyarakat pesisir, kebiasaan masyarakat (alat tangkap dan ukuran kapal), *transfer knowledge*, dan faktor lainnya. Dari dimensi sosial, program bantuan kapal dapat berhasil dengan implikasi kebijakan pada atribut peningkatan partisipasi masyarakat dalam program Kapal bantuan, peningkatan kerja sama dalam usaha perikanan tangkap, peningkatan jumlah desa yang memperoleh bantuan, dan penguatan keterlibatan masyarakat adat dalam program Kapal bantuan. Dari dimensi kelembagaan, prioritas untuk meningkatkan keberhasilan program Kapal bantuan adalah penguatan pada atribut kelembagaan keuangan mikro, lembaga sosial, lembaga penyuluh, penguatan kelompok pengawas dan kelompok nelayan. Dilihat dari nilai stress dan RSQ semua dimensi dapat disimpulkan ketepatan pengukuran konfigurasi atribut keberhasilan program dalam suatu titik adalah cukup tepat. Dari dimensi ekonomi, keberhasilan program Kapal bantuan ditentukan oleh kebijakan menge-

nai mata pencarian alternatif usaha selain usaha perikanan tangkap, peningkatan keuntungan usaha dari perikanan tangkap, pemberian subsidi terhadap perikanan tangkap, peningkatan kualitas tenaga kerja dalam hal ini nelayan atau ABK yang yang menjalankan kapal bantuan, ketersediaan SDM, transfer keuntungan dan mengurangi ketergantungan perekonomian terhadap usaha perikanan tangkap. Diharapkan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap memperhatikan budaya *one day fishing* pada masyarakat pesisir, kebiasaan masyarakat (alat tangkap dan ukuran kapal), *transfer knowledge*, dan faktor kualitatif lainnya, tidak hanya memperhatikan faktor kuantitatif seperti potensi perikanan pada setiap daerah, jumlah nelayan, jumlah produksi, jumlah kapal, jumlah KUB (Kelompok Usaha Bersama), dan keberadaan pelabuhan perikanan.

Pustaka Acuan

- Bakar, S.A., S.Muhammad, Maryunani, dan N. Hanani. (2012). *A Study on Empowerment Partner Model in Fishing Community in City of Bengkulu, Sumatra, Indonesia*. *ATBAS Journal* 4 (2):46-50
- Budianto, S. (2012). *Pengelolaan Perikanan Tangkap Komoditas Udang Secara Berkelanjutan di Kabupaten Cilacap*. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Program Studi Magister Ilmu Kelautan Universitas Indonesia.
- Fauzi, A. dan Suzy, A.. (2002). *Evaluasi status keberhasilan pembangunan perikanan: aplikasi pendekatan Rapfish (studi kasus perairan pesisir DKI Jakarta)*. *Jurnal Pesisir dan lautan. Indonesia journal of coasatal and marine resources* 4(3).
- Gasperz. (1992) . *Teknik Analisis dalam Penelitian Percobaan*, Edisi ke-2. Tarsito. Bandung.
- Hartono, T, Kodiran, T, Iqbal, M, Koeshendrajana, S. (2005). *Pengembangan Teknik Rapfish Untuk Penentuan Indikator Kinerja Perikanan Tangkap Berkelanjutan di Indonesia*. *Buletin Ekonomi Perikanan*, 6 (1).
- Johar, Y. (2012). *RAPFISH:Kelebihan dan Kelemahannya*. <http://yarjohan.blogspot.com>.
- Johnsen, J.P. dan J. Vik. (2013). *Pushed or pulled? Understanding fishery exit in a welfare society context*. *Maritime Studies Journal* 12 (4):1-20.
- Pitcher, T.J., and M.D. Power. (2000). *Fish Figures: Quantifying the Ethical Status of Canadian Fisheries, East and West*. In H. Coward., R. Omer., and T. Pitcher. *Just Fish: Ethics and Canadian Marine Fisheries*. *ISER. New Foundland. Canada*.
- Monintja, D.R. (2007). *Analisis Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tangkap Berkelanjutan di Kabupaten Indramayu*. Disertasi Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Mallawa, A. (2006). *Pengelolaan Sumberdaya Ikan Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat*. Lokakarya Agenda Penelitian Program Coremap II Kabupaten Selayar. 9-10 September.
- Nijkamp. (1980). *Environment policy analysis: Operational Methods and models*. John Wiley and sons. New York .
- Nurmalina, R. (2008). *Analisis Indek dan Keberhasilan Sistem Ketersediaan Beras di Beberapa Wilayah Indonesia*. *Jurnal Agro Ekonomi* 26 (1).
- Purwaningsih, R, S.Widjaja, S.G.Pratiwi. (2012). *Pengembangan Model Simulasi Kebijakan Pengelolaan Ikan Berkelanjutan*. *Jurnal Teknik Industri* 14 (1).
- Sabarariah, V, T.Pattisiana, D.Parenden. (2010). *Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Evaluasi Keberhasilan Teluk Doreri Kabupaten Manokwari*. *Jurnal Perikanan Kelautan*. Universitas Negeri Papua 6 (2).
- Sapanli, K, Aprianti, G.M Irsyad, M.Firdaus, B. Budyiansyah. (2009). *Penguatan Kelembagaan Lokal Dengan Model Coomanagement Dalam Rangka Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Di Kabupaten Pandeglang*. *Jurnal Bestari*. Universitas Muhammadiyah Malang 42 (1).
- Sidiq, M. (2010). *Evaluation Du Statut De La Durabilite Du Developpement Dans Les Zones Cotieres De Semarang, Indonesie*. *Memoir*. Universite de la Rochelle.
- Sundah, D., A. Suman, Soemarno, dan P. Kindangen. (2013). *How Coastal Development, Environmental Change, And Adaptive Behavior Affects Fishermen's Welfare?: (A Study Of Traditional Fishermen From The Coastal Area Of Manado Bay, Indonesia)*. *Journal Of Humanities And Social Science* 17 (4):24-34.
- Sembiring, M. (2007). *Analisis Keberhasilan Perikanan Tangkap Skala Kecil di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara*. Pasca Sarjana Fakultas Perikanan Universitas Pajajaran. Bandung.
- Ticoalu, D.B.S, E. Reppie, dan A.T.R. Telleng. (2013). *Analisis Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Tangkap di Kota Manado*. *Jurnal Ilmu Tekonologi Perikanan Tangkap* 3 (1):76-80.

- Trisbiantoro, D., S.O. Madyowati, dan N. Trisyani. (2013). *Model Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Pesisir Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek*. Jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen Bisnis 4 (1): 18-29.
- Walundungo, G.A, M. Paendong, dan T. Manurung. (2014). *Penggunaan Analisis Multidimensional Scalling Untuk Mengetahui Kemiripan Rumah Makan Di Manado Town Square Berdasarkan Karakteristik Pelanggan*. Jurnal JDC 3 (1).
- Wasak, M. (2012). *Keadaan Sosial-Ekonomi Masyarakat Nelayan di Desa Kinabuhutan, Kecamatan Likupang Barat, Sulawesi Utara*. Pacific Journal 7 (1): 13-39.
- Wijayanti, L. dan Ihsannudin. (2013). *Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*. Jurnal Agriekonomika 2 (2).